

Journal of International Relations Diponegoro
Volume 9 Issue 2 Year 2024 Page 15-30

DIPLOMASI INDONESIA PADA PARIWISATA HALAL MELALUI KERJA SAMA INDONESIA-MALAYSIA- THAILAND GROWTH TRIANGLE (IMT-GT)

Muhammad Riandani

Departement Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Padjadjaran
muhammad18034@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Indonesia dewasa ini sedang melakukan pengembangan industri pariwisata halal. pengembangan ini didasari oleh potensi pariwisata halal yang menjanjikan secara faktor ekonomi. Dalam mengembangkan pariwisata halal, Indonesia melakukan kerjasama dengan Malaysia dan Thailand dalam Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat daerah perbatasan, membangun konektivitas ketiga negara dan mengembangkan industri pariwisata dan halal bersama. melalui IMT-GT, kerjasama yang dilakukan bersifat saling melengkapi atau komplementaritas ekonomi yang didasari oleh komitmen bersama dan koordinasi kebijakan. Tujuan riset ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk mengembangkan pariwisata halal dalam forum kerjasama IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle). Riset ini menggunakan konsep regionalisme, diplomasi, dan growth triangle. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Pengumpulan data dilakukan melalui Teknik riset secara daring melalui internet, studi Pustaka, dan observasi. Hasil riset menunjukkan bahwa pengembangan industri pariwisata halal Indonesia dilakukan melalui akselerasi pembangunan infrastruktur untuk menopang aktivitas pariwisata, serta meningkatkan kapasitas halal melalui pertukaran ahli, informasi, dan efektivitas sertifikasi. Indonesia dalam melakukan pengembangan pariwisata halal melakukan upaya diplomasi dalam IMT-GT melalui track-one diplomacy dimana aktor pemerintah berperan lebih dominan dalam melakukan upaya diplomasi dan menentukan kebijakan.

Kata Kunci : Diplomasi, Pariwisata Halal, Growth Triangle

Abstract

Indonesia is currently developing the halal tourism industry. This development is based on the promising potential of halal tourism in terms of economic factors. In developing halal tourism, Indonesia is collaborating with Malaysia and Thailand in the Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle. The aim of this collaboration is to improve the economy of the border area community, build connectivity of the three countries and develop the tourism and halal industry together. through the IMT-GT, the cooperation carried out is complementary or economic complementarity based on shared commitment and policy coordination. The purpose of this research is to describe Indonesia's diplomatic efforts to

develop halal tourism in the IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) collaboration forum. This research uses the concepts of regionalism, diplomacy, and growth triangle. The approach used is a qualitative approach with analytic descriptive method. Data collection was carried out through online research techniques via the internet, library research, and observation. The research results show that the development of Indonesia's halal tourism industry is carried out through accelerating infrastructure development to support tourism activities, as well as increasing halal capacity through exchange of experts, information, and effectiveness of certification. Indonesia in developing halal tourism is making diplomatic efforts in the IMT-GT through track-one diplomacy where government actors play a more dominant role in making diplomatic efforts and determining policies.

Keywords : *Diplomacy, Halal Tourism, Growth Triangle.*

PENGANTAR

Dalam hubungan internasional, sektor pariwisata berperan aktif sebagai medan praktisi diplomasi, kerjasama, bertukar informasi, dan sebagai sarana mengenalkan citra dan karakteristik khas suatu bangsa terhadap dunia luar yang diperoleh melalui pengalaman kunjungan para wisatawan mancanegara. Pemanfaatan pariwisata dalam mencapai kepentingan nasional merupakan suatu langkah efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan tidak melibatkan paksaan terhadap publik namun lebih mudah diterima dikarenakan didalamnya terdapat nilai dan norma umum diantaranya tradisi, kebudayaan, estetika, keimanan, situs bersejarah atau arsitektur unik sebagai daya tarik bagi masyarakat dunia (HD Wiratma, 2017). Akibatnya pariwisata berdampak besar terhadap terciptanya kebijakan luar negeri berupa hubungan bilateral di seluruh dunia dan bahkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global maupun nasional. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB global menunjukkan adanya angka pertumbuhan yang cukup.

Melalui data yang diperoleh sejak peristiwa krisis ekonomi pada 2009 hingga pada tahun 2019 terdapat pertumbuhan angka sebanyak 4% dari jumlah wisatawan internasional 892 juta orang (2009) hingga 1.461 juta orang (2019) (Sugihamretha, 2020). Selanjutnya melalui data World Travel and Tourism Council (WTTC) menunjukkan bahwa tahun 2019, sektor pariwisata berkontribusi pada pertumbuhan angka PDB global yaitu sebesar 10,4% dari total PDB global, atau sebesar 9,170 milyar USD (WTTC, 2021). Dalam ranah lokal, mengacu pada Laporan Kerja Kementerian Pariwisata pada 2018, pariwisata Indonesia memberikan kontribusi sebesar 5,25% yang mana peningkatan ini membutuhkan waktu tiga tahun dalam peningkatannya sejak tahun 2015 sebesar 4,25% (CNN Indonesia, 2020). Meskipun kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB berjalan dengan lambat, potensi ini dapat dikembangkan melalui pasar yang lebih luas. Terlebih lagi, upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan potensi pariwisata halal setidaknya dapat menjangkau pasar yang lebih kompleks.

Perkembangan pasar ini juga adalah peluang yang sangat menguntungkan bagi industri pariwisata. Berdasarkan laporan dari perusahaan pemeringkat industri wisata Cresentrating Halal Friendly Travel (Singapura) dan Dinar Standard (Amerika Serikat) menyebutkan bahwa terdapat peningkatan belanja pada segmen wisatawan muslim di seluruh dunia, dimana pertumbuhan ini dinilai sebagai pertumbuhan tercepat. Pada

riset yang diperoleh berdasarkan gaya belanja kaum muslim di 47 negara, pada tahun 2011 nilai belanja wisatawan muslim mencapai angka 126 milyar USD dan meningkat hingga 192 milyar USD pada tahun 2020 (Priyadi, 2020). Selanjutnya, menurut Pew Research berkembangnya populasi muslim di dunia diperkirakan sebanyak 2,2 miliar pada 2030 yaitu sebesar 26.4% total populasi dunia (Michael Lipka, Pew Research, 2017). Hal ini berarti semakin banyaknya dana dikeluarkan terhadap industri wisata, khususnya bagi para penduduk yang memiliki kekayaan yang berasal dari negara penghasil minyak. Melalui data ini, terdapat potensi perkembangan pasar muslim global yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Fenomena pertumbuhan pariwisata halal merupakan sebuah peluang yang tidak hanya dimanfaatkan negara muslim, namun berkembang di negara Asia seperti Thailand, Jepang dan bahkan negara Eropa seperti Inggris.

Dalam lingkup ASEAN, pariwisata halal merupakan sebuah konsep yang terbilang muda dengan potensi yang sangat menjanjikan. Hal ini juga turut menjadi fokus bagi negara-negara anggota ASEAN dalam mengembangkan industri ini pada negaranya masing-masing yang dilakukan melalui upaya-upaya kerja sama. Upaya kerja sama ini diantaranya yaitu kerja sama sub-regional dalam Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Kerja sama IMT-GT pada dasarnya merupakan forum kerja sama antara tiga negara dengan kondisi geografis yang berdekatan yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand. Sejak awal pembentukannya pada 1993, IMT-GT memiliki visi dalam mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah sub-kawasan IMT-GT (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Kerja sama antar tiga negara ini merupakan bentuk kerja sama jangka panjang dimana pada periode tertentu, terdapat target-target yang harus dicapai. Kemudian, terdapat tujuh pilar strategis yang diharapkan dapat menghasilkan dampak secara signifikan. Tujuh pilar ini dikelompokkan pada tiga fokus utama yaitu pertanian dan industri berbasis agro, pariwisata, serta produk dan jasa halal. Kerja sama ini pada pelaksanaannya secara khusus mencantumkan pariwisata dan pengembangan produk halal dalam salah satu tujuan yang akan dicapai. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, pariwisata dan produk halal merupakan kerangka dalam mengembangkan industri pariwisata halal.

TINJAUAN PUSTAKA

Diplomasi

Diplomasi adalah suatu kajian yang relevan saat ini dalam studi hubungan internasional. Diplomasi dipahami sebagai sebuah seni bernegosiasi dengan negara lain dengan tujuan tertentu. Sir Ernest Satow mendefinisikan diplomasi sebagai sebuah penerapan taktik dan kepandaian dalam pelaksanaan hubungan resmi pemerintah dengan negara berdaulat (Schwietzke, 2011). Nicholson salah satu praktisi diplomasi pada abad ke-20, menyatakan bahwa diplomasi terkait dengan empat hal penting, yakni politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi, dan sebagai cabang Dinas Luar Negeri (Roy, 1995).

Jika dipandang secara umum, diplomasi merupakan hubungan antar negara dan proses global, lain halnya jika dipandang secara spesifik, dimana diplomasi merupakan sebuah wawasan yang bertujuan untuk mengatur perilaku aktor-aktor negara dalam sistem internasional melalui instrument yang telah ada (Baylis, 2011) Diplomasi secara umum berisi tentang upaya dan proses kerja sama antar negara dalam tujuannya untuk mencapai kepentingan setiap negara melalui aktor negara maupun aktor non-negara. Proses diplomasi dilakukan oleh seorang diplomat. Ellis Briggs menyatakan bahwa terdapat tiga kategori berdasarkan peran seorang diplomat yaitu *negotiation*, *representation*, dan *reporting*. Komunikasi yang baik merupakan keterampilan yang paling utama harus dimiliki oleh seorang diplomat untuk memungkinkan proses diplomasi dapat berjalan dengan lancar (Van Dinh, 1987) Kemudian, Barston (Barston, 2019) mengasumsikan bahwa terdapat perubahan dalam praktik diplomasi dengan melupakan sisi tradisionalnya yaitu dominasi negara. Perubahan pada praktik diplomasi ini secara modern lebih menekankan terhadap manajemen hubungan antarnegara dan aktor hubungan internasional yang lain. Proses demokratisasi di berbagai negara berdampak pada hubungan antarmanusia yang semakin kompleks sehingga opini publik berpengaruh secara kuat dalam proses kebijakan luar negeri sebuah negara.

Hal ini tentunya menghadirkan relevansi yang baru terhadap aktor-aktor non-negara dalam melakukan kegiatan diplomasi. Sejalan dengan ini, sejatinya bidang pariwisata dalam perkembangannya melibatkan berbagai aktor didalamnya. Kendati demikian, aktor pemerintah merupakan aktor utama yang bertugas dalam menentukan kebijakan dan legalisasi. Keterlibatan aktor pemerintah ini dikenal dalam istilah *track-one diplomacy*. Kewenangan negara dalam menggunakan kekuasaan memberikan peran yang krusial bagi kelangsungan praktik diplomasi antar negara. Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle dalam praktiknya lebih cenderung menggunakan aktor negara dalam melakukan upaya diplomasi, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa aktor lain dapat berperan didalamnya.

Kerjasama Regional

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle merupakan sebuah bentuk Kerjasama regional. Kerja sama regional merupakan bentuk negosiasi-negosiasi antarnegara dengan adanya interdependensi sampai pembentukan rezim dengan tujuan untuk memelihara kesejahteraan, meningkatkan nilai-nilai bersama, memecahkan masalah terutama yang muncul akibat interdependensi regional. Sebagaimana pernyataan Oran Young bahwa kerja sama regional mengarah pada terciptanya institusi formal, dengan struktur yang longgar seperti pertemuan-pertemuan rutin yang menghasilkan aturan-aturan serta mekanisme pelaksanaan dan persiapan terhadap kegiatan tersebut (Hurrell & Fawcett, 1995:42). Kerja sama negaranegara memiliki keunikan dan kohesi yang berbeda dan membuatnya unik. Meskipun demikian, secara umum tingkat-tingkat kerja sama regional dapat dikelompokkan

kedalam empat jenis utama yaitu asosiasi, koordinasi, harmonisasi, dan integrasi (Nuraeni S. et al., 2010).

Pertama, Asosiasi dapat diidentifikasi dalam bentuk pertemuan-pertemuan negara dalam membahas isu tertentu tanpa menuju tahap merumuskan aturan bersama. Pertemuan-pertemuan ini dapat diwujudkan dalam bentuk summit meeting ataupun annual meeting. Kinnas dan Groom (1990) menyatakan bahwa tingkat asosiasi ini adalah hubungan informal ditandai dengan tidak adanya konstitusi, meskipun tetap diarahkan oleh prinsip formal dan adanya kesinambungan kebiasaan yang berasal dari praktik-praktik yang dapat diterima. Selanjutnya, Kinnas dan Groom menjelaskan bahwa terdapat tiga karakteristik utama dalam asosiasi yaitu informal, concerned independence, dan family of nations (1990). Karakteristik asosiasi yang pertama yaitu bersifat 'unofficial' meskipun terdapat konstitusi yang menandai lahirnya, namun tidak berbentuk organisasi khusus sehingga sifatnya tidak mengekang negara karena tidak terdapat force didalamnya. Ikatan yang diidentifikasi didalamnya berdasar pada pemahaman dan nilai-nilai bersama sehingga bersifat fleksibel. Karakteristik kedua yaitu concerned independence yaitu asosiasi bersifat terbuka terhadap keberagaman baik secara ekonomi, politik, maupun sosial sehingga tidak adanya eksklusivitas hubungan dan menghasilkan keseimbangan hubungan dengan sendirinya.

Karakteristik ketiga yaitu family of nations, yang berarti adanya kesamaan dimension internal dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama dari banyak actor dalam tingkatan kerja masing-masing didalamnya. Hal ini baik diantara pemerintah dengan rakyatnya maupun negara dengan negara anggota asosiasi lainnya. Kedua, adalah koordinasi. Tingkat kerja sama ini berbentuk pertemuan antar-negara dimana didalamnya terdapat kesepakatan dari masing-masing negara untuk menangani isu-isu tertentu. Paul Taylor (dalam Groom & Taylor, 1990) menjelaskan koordinasi sebagai cara untuk membuat kebijakan bersama antara aktor yang mempunyai kompetensi secara legal atau formal dalam aspek-aspek kebijakan tertentu dan harus memenuhi tiga unsur, yaitu: terdapat kebebasan dari setiap actor dalam menentukan pilihannya, kebijakan yang dikoordinasikan mengarah pada kesepakatan bersama, dan kebijakan yang dilaksanakan dianggap menguntungkan bagi pihak-pihak terkait.

Ketiga, harmonisasi, adalah tingkatan dimana masing-masing negara melakukan penyesuaian terhadap kebijakan luar negeri negara lain, namun belum mencapai kesepakatan tentang otoritas, norma yang dianut bersama, dan struktur kerja sama. Harrison dan Mungal menyatakan bahwa wujud dari harmonisasi dapat ditinjau dalam bentuk 'forum' (Harmonization dalam Groom & Taylor, 1990). Harrison dan Mungal menjelaskan dalam upaya melakukan harmonisasi, terdapat empat Teknik yaitu riset, peninjauan Kembali, uji kebijakan, dan forum. Teknik pertama, riset adalah upaya untuk menyelidiki, membandingkan, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan negara-negara yang bersangkutan. Teknik kedua, peninjauan kembali merupakan upaya peninjauan secara periodic terhadap aktivitas

kebijakan nasional negara anggota dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan menyelaraskan kebijakan negara-negara dan menghindari pengaruh negatif yang dapat merusak proses harmonisasi secara menyeluruh. Teknik ketiga, uji kebijakan nasional merupakan upaya menguji kebijakan nasional terhadap suatu isu, aspek, atau bidang untuk melihat tanggung jawab para official (pegawai pemerintah) suatu negara. Teknik ini pada dasarnya berwujud saran bersama dan upaya saling tukar informasi dibandingkan dengan keinginan untuk mengubah kebijakan nasional negara lain. Teknik keempat, forum merupakan sebuah wujud harmonisasi dimana negara dan actor non-negara lainnya menyelaraskan berbagai kepentingan mereka serta menjaga situasi kondusif. Harrison dan Mungal mengasumsikan bahwa harmonisasi dapat tercapai apabila diantara aktor ini dapat meningkatkan kesadaran akan adanya interdependensi satu sama lain, kesesuaian terhadap masalah yang dihadapi bersama terkait dengan prinsip dan asumsi (1990).

Keempat, Integrasi dimana pada tingkat ini kerja sama telah mengarah pada pembentukan norma bersama dan terbentuk sebuah organisasi regional yang diberikan sebuah wewenang. Pada tingkatan ini, integrasi bersifat sepenuhnya seperti halnya Uni Eropa dimana didalamnya telah mengarah pada terbentuknya supranasional. Adapun integrasi yang bersifat sebagian atau hanya dalam aspek-aspek tertentu seperti halnya ASEAN.

Growth Triangle

Growth Triangle (GT) atau segitiga pertumbuhan pada dasarnya merupakan konsep ekonomi meskipun seringkali didorong oleh motivasi politik dalam pelaksanaannya. Konsep ini didalamnya termasuk menyatukan atau melampaui batas sebagian wilayah dari negara yang berbeda dengan faktor penyumbang utama yang berbeda-beda yang menjadikannya sebagai comparative advantage (Humphries, 1995). David Wadley menyatakan bahwa segitiga pertumbuhan merepresentasikan solusi seperti pertukaran dan ketersediaan sumber daya bagi berbagai permasalahan di benua Asia terkait perkembangan ekonomi (Wadley & Parasati, 2000). Pertumbuhan pada konsep ini disukseskan oleh sektor privat dengan negara yang berperan untuk memfasilitasi melalui upaya menghapus batas dengan tujuan untuk melancarkan barang dan jasa melewati perbatasan (Asia Pacific Foundation of Canada, 1994). Melalui pernyataan ini maka dapat diasumsikan bahwa segitiga pertumbuhan membutuhkan sektor privat sebagai akselerator pertumbuhan dalam agendanya.

Selanjutnya wilayah-wilayah segitiga pertumbuhan sejatinya merupakan wilayah yang disebut sebagai economic complementaries. Konsep ini berarti ekonomi yang saling melengkapi dimana hal ini terjadi dari adanya eksploitasi dalam berbagai tahapan pada pengembangan dan faktor pendukung. Humphries menyatakan bahwa ekonomi yang saling melengkapi adalah faktor kunci dimana hal ini menyediakan logika yang mendasari dalam menarik minat sektor privat. Selanjutnya, komplementaritas ekonomi ini muncul akibat dari perbedaan dalam faktor pendukung

seperti tanah, sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi dan modal lalu Pola investasi dan perdagangan serta Tingkat pembangunan ekonomi, dengan akses terkait dengan teknologi, infrastruktur dan layanan, kualitas dan pengalaman personil serta keahlian manajemen (1995).

Tang dan Thant menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memastikan kesuksesan dari segitiga pertumbuhan ini diantaranya yaitu ekonomi yang saling melengkapi, kedekatan geografis, komitmen pemerintah, koordinasi kebijakan, pengembangan infrastruktur, serta peran vital dari sektor privat (Tang & Thant, 1994). Pola yang sering ditemui dalam pelaksanaannya yaitu menyatukan daerah yang secara natural dapat berhubungan secara ekonomi namun terpisah akibat kepentingan politik. Kedekatan geografis yang terbatas oleh batasan politik ini pada dasarnya memiliki sedikit kesamaan dalam hal kebudayaan masyarakatnya sehingga dapat memudahkan proses koordinasi dan komunikasi.

METODE RISET

Dalam melakukan riset ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Mengacu pada definisi penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln yaitu sebuah penelitian dengan menafsirkan suatu fenomena menggunakan latar alamiah dan melibatkan berbagai metode didalamnya (Denzin & Lincoln, 2017). penulis memahami bahwa penelitian kualitatif merupakan upaya untuk mengumpulkan data yang berdasar pada latar ilmiah dengan tujuan utama untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena selanjutnya perlu dipahami bahwa penelitian kualitatif dilakukan dan diperoleh tanpa menggunakan berbagai metode statistik ataupun cara-cara kuantifikasi melainkan dengan mengumpulkan data, menganalisis, untuk kemudian menginterpretasi hasilnya.

Salah satu upaya mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui upaya Internet based research. Pada era teknologi ini, kehadiran internet dinilai memberikan manfaat dan mempermudah kegiatan manusia dimana salah satunya ialah melakukan riset. Data yang diperoleh dari dalam jaringan (daring) berupa berita, buku yang dipublikasi secara digital, artike jurnal dan lainnya. Menurut Lamont (Lamont, 2015), sebelum menggunakan data melalui internet, data tersebut harus dipilih dan dibuktikan kredibilitas sumber data tersebut. Setelah sebelumnya data yang diperoleh secara daring, studi kepustakaan menggunakan sumber data luar jaringan (luring). Data yang diperoleh secara luring berwujud fisik seperti riset terdahulu, dokumen resmi dari instansi pemerintah maupun instansi swasta yang terkait dengan topik penelitian (Lamont, 2015). Observasi adalah salah satu Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Adapun langkah melakukan observasi yaitu: menentukan perilaku menarik, merekam pengamatan melalui metode tertentu, kemudian menyelaraskan kesepahaman antar pengamat agar data memiliki tingkat validitas yang tinggi (Salkind, 2010).

PEMBAHASAN

Jika membahas mengenai industri pariwisata dan industri halal di Indonesia, keduanya merupakan sebuah konsep yang berbeda namun pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Pariwisata halal merupakan sebuah konsep yang sedang berkembang. Saat ini tidak terdapat konsep yang dapat menjelaskan definisi maupun aturan halal yang dapat dijadikan sebuah rujukan dalam menelaah pariwisata halal secara menyeluruh.

Demikian dalam pelaksanaannya, pariwisata halal bukanlah suatu hal yang umum terdengar bagi masyarakat awam khususnya negara-negara non-muslim. Banyaknya miskonsepsi ini terjadi di masyarakat non-muslim, bahkan sering terjadi pada masyarakat muslim itu sendiri. Di Indonesia, kesadaran masyarakat atas pariwisata halal dinilai cukup rendah. Hal ini dikarenakan kekeliruan masyarakat dalam memahami konsepsi pariwisata halal. Anggapan masyarakat mengenai pariwisata halal yaitu tidak lain adalah wisata syariah atau religi dimana tujuan wisata yaitu untuk beribadah (pilgrim) (Idealisa Masyrafina, 2019). Selain adanya kesalahpahaman terhadap identifikasi pariwisata halal, Indonesia belum menentukan regulasi terhadap pariwisata halal. Saat ini, regulasi hanya berdasarkan peraturan pariwisata dan ketentuan halal dari produk dan jasa berdasarkan syariah.

Jika ditelaah lebih dalam, pariwisata halal sejatinya merupakan bagian dari industri wisata dengan pasar yang khusus dan unik karena merujuk pada aturan Islam dan secara khusus bertumpu pada demografi pasar muslim. Secara unik, konsep pariwisata halal dipahami sebagai bagian dari industri pariwisata dimana sumber daya berasal, namun penyedia regulasi berdasar pada peraturan Syariah. Melalui uraian sebelumnya, penulis memahami bahwa meskipun pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat muslim atau wisata ramah muslim, tetapi dalam pelaksanaannya tidak menutup pemanfaatannya bagi wisatawan non-muslim. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pariwisata halal tidak sepenuhnya menghapus segala aturan dan fasilitas yang bertentangan dengan aturan-aturan Islam, namun lebih menciptakan lingkungan pariwisata yang ramah bagi masyarakat muslim dalam menjalankan kepercayaannya. Sebagai contoh, pariwisata halal memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk beribadah dengan menyiapkan sarana ibadah yang mudah dijangkau seperti di sekitaran tempat menginap (hotel), menyediakan makanan dan minuman halal, serta memastikan mobilisasi yang mudah untuk beribadah khususnya bagi para penyedia jasa transportasi dan pemandu wisata sehingga pelaksanaan ibadah sepanjang perjalanan tetap diperhatikan. Maka dari itu, pariwisata halal menyediakan sebuah kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan sebelum menentukan destinasi wisata, hal ini berdasar pada realita bahwa penduduk muslim sebagai minoritas dengan Islamophobia (anti Islam) yang marak dijumpai di negara dengan mayoritas penduduk non-muslim.

Dalam lingkup ASEAN, pariwisata halal merupakan sebuah konsep yang terbilang muda dengan potensi yang sangat menjanjikan. Hal ini juga turut menjadi fokus bagi negara-negara anggota ASEAN dalam mengembangkan industri ini pada

negaranya masing-masing yang dilakukan melalui upaya-upaya kerja sama. Upaya kerja sama ini diantaranya yaitu kerja sama sub-regional dalam Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT). Kerja sama IMT-GT pada dasarnya merupakan forum kerja sama antara tiga negara dengan kondisi geografis yang berdekatan yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand. Sejak awal pembentukannya pada 1993, IMT-GT memiliki visi dalam mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah sub-kawasan IMT-GT (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Kerja sama antar tiga negara ini merupakan bentuk kerja sama jangka panjang dimana pada periode tertentu, terdapat target-target yang harus dicapai. Kemudian, terdapat tujuh pilar strategis yang diharapkan dapat menghasilkan dampak secara signifikan. Tujuh pilar ini dikelompokkan pada tiga fokus utama yaitu pertanian dan industri berbasis agro, pariwisata, serta produk dan jasa halal. Kerja sama ini pada pelaksanaannya secara khusus mencantumkan pariwisata dan pengembangan produk halal dalam salah satu tujuan yang akan dicapai. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, pariwisata dan produk halal merupakan kerangka dalam mengembangkan industri pariwisata halal.

Bidang Kerjasama atau Strategic Pillars ini terdiri dari 7 sektor yang menjadi fokus, diantaranya adalah Sektor Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan, Pelayanan dan produk halal, Sektor Lingkungan, Transportasi dan Teknologi ICT, Sektor Industri berbasis agro dan Agrikultur, dan Fasilitasi Investasi dan Perdagangan. Dalam mengembangkan strategic pillars ini, dibentuk working groups atau kelompok kerja dengan tujuan untuk menentukan project dan kerangka kerja. Meskipun demikian, dalam 7 strategic pillars ini, terdapat tiga fokus utama yang diharapkan dapat menjadi pelopor upaya integrasi dan kerjasama pada visi jangka panjang yaitu sektor Pelayanan dan Produk Halal, Sektor Pariwisata, dan Sektor Industri berbasis Agro dan Agrikultur. Tiga sektor ini di akan didukung oleh four enablers atau empat penggerak yaitu Transportasi dan Teknologi ICT, Fasilitasi Investasi dan Perdagangan, Lingkungan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan. Pembentukan IMT-GT dilakukan setelah pengesahan AFTA (ASEAN Free Trade Area) atau area perdagangan bebas ASEAN dalam ASEAN Summit ke-4 di Singapura pada tahun 1992. Pembentukan AFTA dapat membantu Kawasan ASEAN dalam meningkatkan volume perdagangan antar negara, memikat berbagai investasi asing (Foreign Direct Investment), serta meningkatkan produksi Kawasan secara kompetitif dan memiliki daya saing global. Wilayah yang terlibat dalam Kerjasama ini memiliki tingkat komplementaritas yang berbeda-beda sesuai dengan bidang yang telah disepakati dalam Kerjasama

Dalam konteks IMT-GT, regionalisme yang berusaha dicapai adalah regionalisme dalam ASEAN. Proses regionalisme ASEAN dicapai melalui cakupan kecil atau disebut sebagai sub-bagian melalui proses kerjasama regional atau sub-regional dalam kasus IMT-GT dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas melalui program kerjasama serta komitmen politik dan koordinasi kebijakan. Segitiga

pertumbuhan IMT-GT dalam penyelenggaraannya didasari oleh empat kunci utama untuk mencapai kesuksesannya, yaitu (1) Komplementaritas ekonomi; (2) kedekatan geografis; (3) komitmen politik dan koordinasi kebijakan; dan (4) pembangunan infrastruktur. Kerjasama dalam IMT-GT dalam cakupan yang luas dapat berkontribusi terhadap pembangunan konektivitas ASEAN, dalam cakupan khusus memberikan keuntungan bagi ketiga negara yang terlibat dalam membangun ekonomi dan industri dan mengatasi permasalahan ketimpangan yang terjadi. Selanjutnya, muncul pertanyaan mengenai bagaimana kepentingan Indonesia dalam memanfaatkan konektivitas dan pembangunan ekonomi melalui kerjasama IMT-GT.

Sebelum mengidentifikasi kepentingan Indonesia dalam IMT-GT, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa definisi pariwisata halal secara konsep dikatakan sebagai muslim friendly tourism, dimana pengembangannya lebih berfokus pada industri pariwisata, namun tetap memperhatikan sisi halal-nya melalui penetapan dalam hal legalitas atau syariahnya untuk memastikan penyelenggaraannya ramah terhadap umat muslim. Secara konsep, Indonesia belum memahami dan menentukan konsep pariwisata halal seutuhnya. Hal ini berdasar pada asumsi yang ditangkap oleh masyarakat umum saat perencanaan pembangunan pariwisata halal pertama kali mencuat ke publik. Mayoritas masyarakat lebih cenderung mengartikan pariwisata halal sebagai Wisata Pilgrim yaitu perjalanan wisata yang lebih terfokus pada pemenuhan sisi spiritualitas seseorang seperti Ibadah haji dalam agama Islam. Hal ini cenderung memunculkan kesalahpahaman mengenai konsep dasar yang mana akan berdampak pada pembangunan industri dalam jangka panjang dan interpretasi secara hukum daerah yang berbeda-beda.

Maka perlu dipahami bahwa upaya pengembangan pariwisata halal di Indonesia cenderung belum matang dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand. Maka dari itu, pengembangan pariwisata halal di Indonesia berupa pengembangan yang terpisah, yaitu pengembangan industri pariwisata dan pengembangan ekosistem halal. Kepentingan Indonesia dalam kerjasama IMT-GT adalah meningkatkan kapasitas dan mempersiapkan industri pariwisata Halal di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur untuk menopang aktivitas pariwisata, serta meningkatkan kapasitas halal melalui pertukaran ahli, informasi, dan efektivitas sertifikasi. Akselerasi pembangunan industri pariwisata dilakukan melalui konektivitas secara fisik dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur pada dasarnya dilakukan untuk mempermudah mobilisasi barang dan orang. Kunci penting yang perlu digaris bawahi dalam pembangunan infrastruktur ini adalah kemudahan akses bagi pelaku usaha, distributor bahan baku, hingga wisatawan yang akan berkunjung terhadap destinasi wisata. Bersama IMT-GT, Indonesia melakukan kerjasama yang mana salah-satunya adalah menyepakati economic corridors sebagai jalur perekonomian atau jalur dimana arus mobilisasi ekonomi terjadi. Kesepakatan economic corridors dalam IMT-GT, mewajibkan pemerintah ketiga negara untuk mempertahankan komitmen

politiknya terhadap pembangunan infrastruktur, karena komitmen pembangunan ini sangat menentukan terhadap kesuksesan konektivitas ini.

Diplomasi Indonesia di bidang Pariwisata dalam IMT-GT

Salah satu proyek utama yang menjadi kerangka utama dalam pembangunan pariwisata dan laju perekonomian yaitu Physical Connectivity Project (PCP). PCP merupakan salah satu proyek yang dibawah oleh fokus area Transportation and ICT Connectivity yang merupakan salah satu dari four enablers yang bertugas untuk membantu pengembangan dari lead focus area dimana didalamnya terdapat fokus area Tourism dan Halal Product and Services. Proyek PCP secara umum bertujuan untuk mempermudah arus distribusi barang, orang, dan jasa serta membangun perekonomian masyarakat daerah dengan membangun infrastruktur sebagai solusi utamanya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan bersama dengan Working Group on Transport Connectivity (WGTC) mencanangkan pembangunan infrastruktur melalui tiga moda transportasi yaitu Darat, Laut, dan Udara. Pembangunan infrastuktur ini sesuai dengan pembagian Economic Corridors (EC) yang telah disepakati sebelumnya. Pembangunan infrastuktur di Indonesia melibatkan pengembangan dalam EC1 dan EC3. Economic Corridors 1 didalamnya meliputi daerah Songkhla (Thailand), Penang (Malaysia) dan Medan (Indonesia). EC1 melibatkan provinsi kaya akan pertanian di Thailand Selatan yang melakukan perdagangan bersama Malaysia, Indonesia, dan Singapura serta berperan penting untuk memasok rantai barang yang diperdagangkan di luar sub-kawasan (Thai Khiun Mien et al., 2017).

Perbatasan ketiga negara ini berfungsi sebagai jangkar yang mengelompokkan kegiatan ekonomi utama melalui pembangunan pusat industri. Melalui EC1, Indonesia melalui Kementerian Perhubungan merampungkan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Medan. Dilihat dari letaknya, Pelabuhan Kuala Tanjung secara strategis terletak pada Selat Malaka yang terkenal sebagai rute perdagangan utama. Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai konektivitas akan menghubungkan jalan toll Trans Sumatra serta secara fungsional sebagai Terminal Multi Purpose yang menjadi Gateway Sumatra Utara dan dapat menampung volume kargo secara optimal sesuai dengan tujuannya untuk menjadi pusat distribusi barang (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 2022). Pelabuhan ini diharapkan menjadi akses poin Indonesia dalam perdagangan khususnya di pulau Sumatra dimana Economic Corridors 3, merupakan koridor ekonomi yang melintang sepanjang Pulau Sumatra. Daerah yang terlibat didalamnya yaitu Palembang, Pekanbaru, Medan, dan Banda Aceh. Koridor ekonomi ini merupakan koridor yang sangat krusial dalam membangun Sumatra dan secara khusus terhadap peningkatan konektivitas dalam sub-wilayah IMT-GT (Thai Khiun Mien et al., 2017). Melalui EC3 Indonesia mengakselerasi pembangunan jalan toll Trans Sumatra, Jalur Kereta Api Lintas Sumatra, dan LRT Palembang. Ketiga infrastruktur pembangunan ini secara konektivitas berhubungan dengan Pelabuhan

Kuala Tanjung yang mana merupakan pusat distribusi barang dalam Pulau Sumatra. Pembangunan jalan toll Trans Sumatra dan Jalur Kereta Api Lintas Sumatra akan memudahkan alur pendistribusian barang, jasa, dan penumpang diseluruh pulau Sumatra yang mana hal ini akan mendorong pembangunan industri pariwisata.

Kemudahan akses dalam distribusi barang dan orang dalam economic corridors ini dapat mengakselerasi pembangunan industri pariwisata halal khususnya di pulau Sumatra. Pembangunan infrastruktur secara garis besar berdampak pada kemudahan mobilisasi arus barang dan jasa, hal ini akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat daerah dan secara bertahap dapat berkontribusi pada menurunnya angka pengangguran dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Diplomasi Indonesia dalam membangun ekosistem Halal dalam kerja sama IMT-GT. Dalam membangun ekosistem halal, penulis mengidentifikasi terdapat dua hal yang harus diperhatikan untuk memastikan kesiapan ekosistem halal didalamnya yaitu adanya legalisasi mengenai praktik halal dan adanya pasar masyarakat yang berorientasi pada pasar halal. Legalisasi disini berarti adanya sertifikasi untuk memastikan suatu produk atau layanan dapat dikatakan halal. Selanjutnya pasar masyarakat halal merupakan adanya sebuah pasar dimana dalam pelaksanaan kegiatannya tetap berpaku pada Syariah. Secara legalitas, Indonesia menentukan legalisasi produk halal berdasarkan UU no. 33 tahun 2014 yang menjelaskan mengenai jaminan produk halal. Penetapan ini didukung oleh Peraturan Menteri Agama nomor 26 tahun 2019 yang membahas mengenai penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Lembaga pemerintah berperan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan bersinergi bersama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga keagamaan non-pemerintah yang berperan dalam memastikan sertifikasi sesuai dengan pedoman/fatwa dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam memastikan kehalalan produk dan layanan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengujian (Humas Kementrian Agama RI, 2022). Hal ini mendorong berbagai institusi non-pemerintah seperti halnya perguruan tinggi untuk membangun pusat riset halal dengan peran penting sebagai auditor produk halal sebelum dinyatakan lulus sertifikasi. Pasar halal di Indonesia pada dasarnya telah ada, meskipun tanpa adanya sertifikasi. Hal ini berdasar pada asumsi bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk pemeluk agama islam. Meskipun demikian, sertifikasi halal sebagai sisi legalitas diperlukan untuk menarik dan meyakinkan para wisatawan maupun para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Maka dari itu diperlukannya pemahaman halal secara mendalam bagi para pelaku industri halal dalam melakukan kegiatannya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh IMT-GT untuk meningkatkan pemahaman halal secara merata terhadap public khususnya para pemilik UMK yaitu melalui program IMT-GT Capacity Building on Halal Industry. Program ini diselenggarakan oleh Center of IMT-GT (CIMT) yang berkolaborasi bersama Working Group on Halal Product and Service (WGHAPAS), dan Islamic Development Bank

(IsDB). Inisiatif ini pertama kali dikemukakan melalui Halal Development Corporation Berhad (HDC) yang mana merupakan agensi dibawah Ministry of International Trade and Industry dari Malaysia (IMT-GT, 2021). Program Halal Capacity Building diperuntukkan kepada para pengusaha lokal dalam lingkup wilayah IMT-GT, khususnya UMK dengan capaian pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan daya saing para pengusaha lokal terhadap pasar halal internasional. Program pembelajaran ini diselenggarakan selama 4 hari dengan proses sertifikasi yang merujuk pada sertifikasi Malaysia berdasar pada asumsi bahwa Malaysia lebih unggul perihal sertifikasi dibandingkan dengan ketiga negara. program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas halal dari pelaku usaha yang didalamnya terdapat faktor seperti penguatan dan pengembangan produk halal, pengemasan, hingga kemampuan pemasaran suatu produk (Pamuji, 2021).

Setelah adanya upaya untuk memberikan pemahaman terhadap pelaku industri, langkah selanjutnya yang dilakukan dalam memastikan kegiatan pariwisata halal di Indonesia adalah meningkatkan awareness mengenai ekosistem halal di Indonesia kepada para wisatawan maupun masyarakat internasional secara menyeluruh. Dalam lingkup IMT-GT dimana dalam rangka meningkatkan industri pariwisata halal ketiga negara diharuskan untuk melakukan upaya seperti saling bertukar akses informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan menambah pemain dalam industri halal, sebagaimana yang tercantum dalam strategi kedua focus area Industri halal. Dalam pagelaran Malaysia International Halal Showcase 2018 (MIHAS 2018), Indonesia membeberkan produk-produk halal terbaiknya melalui 82 perusahaan yang telah berbekal sertifikasi halal secara langsung ke Kuala Lumpur (Halal Corner, 2018). Dalam konteks IMT-GT di bidang produk dan pelayanan halal, pemerintah Indonesia berperan penting untuk melakukan kerjasama dengan Malaysia dalam event Malaysia International Halal Showcase 2018 (MIHAS 2018). Dalam bidang halal, Malaysia lebih diunggulkan secara brand dan logo halal yang telah dikenal luas oleh masyarakat internasional. Hal ini memberikan keunggulan komparatif pada Malaysia dibandingkan dengan Indonesia dan Thailand. Dalam kerjasama IMT-GT setiap negara diharuskan untuk bekerjasama untuk memenuhi faktor komplementaritas ekonomi. Indonesia melalui MIHAS 2018 diberi kesempatan untuk menunjukkan produk halal yang berbekal sertifikasi kepada masyarakat internasional. Hal ini periset asumsikan sebagai upaya yang dapat menarik awareness, interest, dan engagement dari masyarakat internasional terhadap produk halal Indonesia. Melalui showcase ini, Indonesia berpeluang untuk meningkatkan kunjungan wisata dan mendorong pembangunan pariwisata halal dilaksanakan lebih baik.

KESIMPULAN

Dalam membangun pariwisata halal Indonesia, upaya kerjasama dilakukan bersama dengan Malaysia dan Thailand dalam forum kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle. Upaya kerjasama Indonesia dalam IMT-GT pada

umumnya yaitu untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur untuk menopang aktivitas pariwisata seperti pada proyek Physical Connectivity melalui Economic Corridors 1 yaitu pembangunan pada Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai akses poin dalam aktivitas perdagangan di Sumatra yang pengembangannya terkoneksi dengan pengembangan pada Economic Corridors 3 yaitu pengembangan jalan toll Trans Sumatra, jalur Kereta Api Lintas Sumatra, dan LRT Palembang yang memberikan kemudahan mobilisasi arus barang dan orang di pulau Sumatra. Adapun upaya kerjasama dalam pengembangan produk dan layanan halal, upaya kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas halal di Indonesia seperti efisiensi sertifikasi, pemahaman pelaku usaha terhadap industri, pertukaran ahli dan informasi mengenai industri halal dan awareness wisatawan mengenai industri pariwisata halal di Indonesia melalui event internasional seperti MIHAS 2018.

Pemerintah sebagai aktor utama dalam melakukan kegiatan diplomasi berperan penting dalam menentukan kebijakan seperti pada penetapan UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berdampak pada munculnya berbagai lembaga pemeriksa halal yang berkontribusi pada kesiapan industri pariwisata halal di Indonesia. Selanjutnya, upaya kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dalam IMT-GT merupakan langkah yang tepat berdasar pada komplementaritas ekonomi dimana pemerintah Malaysia lebih unggul dalam hal pariwisata halal di negaranya, komplementaritas ini tentunya memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam membangun pariwisata halal dan meningkatkan awareness terhadap masyarakat dunia mengenai penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia.

Indonesia perlu serius untuk melakukan pengembangan Industri pariwisata halal untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara khususnya di Asia tenggara. Meskipun, dikatakan sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia belum sebaik negara seperti Malaysia dalam hal pengembangan Industri pariwisata halal. Untuk menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan industri pariwisata halal, Indonesia perlu membuat aturan mengenai penyelenggaraan pariwisata halal secara lebih mendetail untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengembangan yang disebabkan oleh banyaknya multitafsir dalam penyelenggaraannya

REFERENCES

- Asia Pacific Foundation of Canada. (1994). *Eastern Asia: the new shape of growth*. Issues, 8(1).
- Barston, R. P. (2019). *Modern Diplomacy*. *Modern Diplomacy*. <https://doi.org/10.4324/9781351270090>
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2011). *The Globalization of World Politics: An introduction to International relations (Fifth Edition)*. Oxford University Press.

- CNN Indonesia. (2020, February 26). Menghitung Kontribusi Sektor Pariwisata Bagi Ekonomi RI. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200226121314-532-478265/menghitung-kontribusi-sektor-pariwisata-bagi-ekonomi-ri>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (Fifth). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2022, September 27). Pelabuhan Kuala Tanjung Disiapkan untuk Menjadi Transshipment Port Indonesia. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Groom, A. J. R., & Taylor, P. (1990). *Frameworks for International Co-Operation* 1st Edition (First Edition). Palgrave Macmillan.
- Halal Corner. (2018, April 4). Indonesia Ikut Serta MIHAS 2018. Halal Corner. <https://halalcorner.id/indonesia-ikut-serta-mihas-2018/>
- HD Wiratma. (2017). Diplomasi Pariwisata Sebagai Nation Branding Indonesia Di Tingkat Global. Prosiding Seminar Dan Call For Paper, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo--Indonesia, 240–247.
- Humas Kementerian Agama RI. (2022, March 11). Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini Penjelasan Kemenag. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq>
- Humphries, A. M. (1995). *Growth Triangles of South East Asia*. East Asia Analytical Unit.
- Hurrel, A., & Fawcett, L. (1995). *Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order*. Oxford University Press.
- Idealisa Masyrafina. (2019, March 25). Masyarakat Masih Salah Paham Pengertian Wisata Halal, Republika Online. https://www.republika.co.id/berita/po_x1lw459/masyarakat-masih-salah-paham-pengertian-wisata-halal
- IMT-GT. (2021). IMT-GT Capacity Building on Halal Industry.Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle. <https://imtgt.org/imtgt-capacity-building-on-halal-industry/>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 8). Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT). https://kemlu.go.id/portal/id/read/162/halaman_list_lainnya/indonesia-malaysia-thailand-growth-triangle-imt-gt
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. SAGE Publication.
- Michael Lipka. (2017, August 9). Muslims and Islam: Key findings in the U.S. and around the world. Pew Research Center.

- Nuraeni S., Deasy Silvy, & Arfin Sudirman. (2010). Regionalisme dalam studi Hubungan Internasional (E. Adinugraha, Ed.; First edition). Pustaka Pelajar.
- Pamuji, S. (2021, June 18). Indonesia-Malaysia-Thailand Bahas Sinergi Penguatan Ekspor Produk Halal UMK. Kementrian Agama RI. <https://kemenag.go.id/internasional/in-donesia-malaysia-thailand-bahas-sinergi-penguatan-ekspor-produk-halal-umk-zshd5m>
- Priyadi, U. (2020). Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan. UPP STIM YKPN.
- Roy, S. L. (1995). Diplomasi. PT Raja Grafindo Persada.
- Salkind, N. J. (2010). Encyclopedia of Research Design. Dictionary of Statistics & Methodology.
- Schwietzke, J. (2011). Ernest Satow's Guides to Diplomatic Practice. From the First Edition in 1917 to the Sixth Edition (2009). Journal of the History of International Law / Revue d'histoire Du Droit International, 13(1), 235–245. <https://doi.org/10.1163/157180511X552108>
- Sugihamretha, I. D. Gde. (2020). Respon kebijakan: Mitigasi dampak wabah COVID-19 pada sektor pariwisata. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), 191–206.
- Tang, M., & Thant, M. (1994). Growth Triangles: Conceptual Issues and Operational Problems (No. 54; Economic Staff Paper).
- Thai Khiun Mien, B., Krishnan, B. R., Hammond, T., Chandra, A. C., Hock Tsen, W., Sitticharoenchai, A., & Tan Lee Mei, C. (2017). Implementation Blueprint 2017-2021. Centre for IMT-GT Subregional Cooperation.
- Van Dinh, T. (1987). Communication and Diplomacy in a Changing World. Ablex Publishing Corporation.
- Wadley, D., & Parasati, H. (2000). Inside South East Asia's Growth Triangles. Geography, 85(4), 323–334.
- WTTC. (2021). Economic Impact reports. <https://wttc.org/Research/Economic-Impact>.